



Tradisi
damar pemikiran

SEABAD NU: Menuntun Umat, Merawat Jagad

Islam Musuh Terbesar Pancasila (?) | Identitas Pluralisme Nahdlatul Ulama dalam Dinamika Sosio-Politik Indonesia | Menengok Kembali 'Kesuksesan' R20: Bagaimana NU Mengayomi Suara Agama Minoritas? | Islam Pesantren, Visi Kebangsaan, dan Jalan Keselamatan | Puisi Pragmatis



Bunga Rampai Tradisi Edisi I (2023)



Penanggung Jawab

Ketua PMII Komisariat Gajah Mada

Pemimpin Redaksi

Fandy Arrifqi

Dewan Redaksi

Najma Alya Jasmine

Rizal Jamil

Hendrawan Djody Saputro

Muhammad Faiz Khamdani

Nilnarohmah

Dany Chandra Purnama Wibowo

M. Khoirul Imamil M.

Kautsar Luqyana Azri

Muhammad Ilham Kholid

Rahma Kintara Sania Dafin

Desain Sampul

Muhammad Ilham Kholid

Penata Letak Isi

Nilnarohmah

Bunga Rampai Tradisi diterbitkan melalui SK

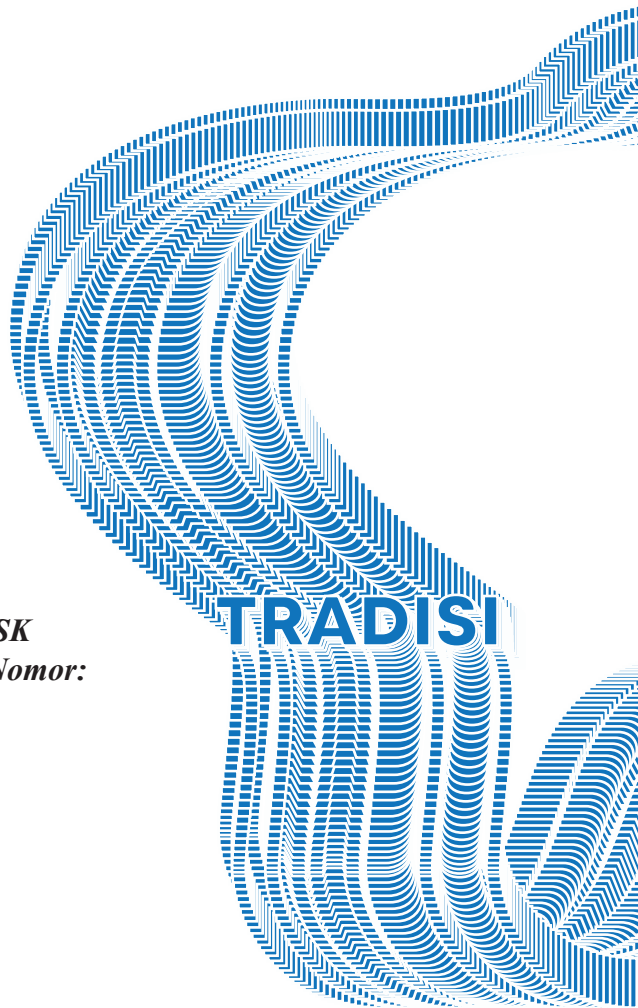
Pengurus PMII Komisariat Gajah Mada Nomor:

66.PK-XXVI.V-05.01.001.A-I.08.2017

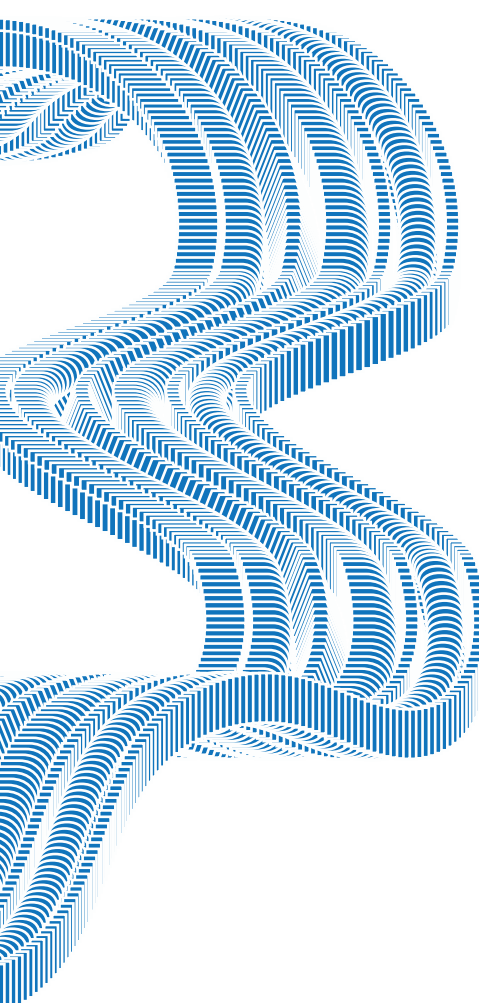
Surel: jurnaltradisi@gmail.com

Instagram: [@lpmtradisi](https://www.instagram.com/lpmtradisi)

Twitter: [@lpmtradisi](https://twitter.com/lpmtradisi)



DAFTAR ISI -



- 01.** ISLAM MUSUH TERBESAR
PANCASILA (?)
Dany Badrun
- 02.** IDENTITAS PLURALISME
NAHDLATUL ULAMA' DALAM
DINAMIKA SOSIO - POLITIK
DI INDONESIA
Fandy Arrifqi
- 03.** MENENGOK KEMBALI
'KESUKSESAN' R20 :
BAGAIMANA NU MENGAYOMI
SUARA AGAMA MINORITAS ?
M. Khoirul Imamil M
- 04.** ISLAM PESANTREN,
VISI KEBANGSAAN,
DAN JALAN KESELAMATAN
Najma Alya Jasmine
- 05.** PUISI PRAGMATIS
Dany Badrun

Menilik Satu Abad ke Belakang, Menyiapkan Satu Abad Ke Depan *Editorial*

Tepat pada tahun ini, Nahdlatul Ulama (NU) genap berusia satu abad. Banyak hal yang sudah dilalui dan dicapai oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Sebagai warga Nahdliyyin, kita patut berbangga karena bisa mencapai titik ini.

Diawali dari pendirian NU yang berusaha melindungi tradisi-tradisi Islam Nusantara, NU justru berhasil melindungi bangsa Indonesia dari penjajahan. Resolusi jihad yang digelorakan oleh KH. Hasyim Asy'ari berhasil membuat santri-santri NU rela mengorbankan segalanya demi melawan kembalinya penjajahan Belanda atas Indonesia. Artikel berjudul "Islam-Pesantren, Visi Kebangsaan, dan Jalan Keselamatan" yang ditulis oleh Najma AJ menjelaskan bagaimana peran NU, melalui pesantren-pesantrennya, dalam menegakkan visi kebangsaan Indonesia.

Setelah keadaan damai, NU masih terlibat aktif dalam perkembangan negara Indonesia. Dari aktif di politik praktis pada Orde Lama sampai kembali pada khittah di tahun 1983. NU pun melahirkan banyak tokoh kenamaan, seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Ahmad Mustofa Bisri, dan masih banyak lagi.

Kini, walaupun sudah tidak terlibat dalam politik praktis, NU masih berkontribusi banyak kepada bangsa melalui kegiatan sosial dan keagamaan. NU terus mendorong perdamaian dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, NU juga melakukan aksi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya.

Namun, satu abad yang lalu merupakan milik generasi Nahdliyyin terdahulu. Kini, satu abad ke depan NU adalah milik generasi muda Nahdliyyin. Melalui bunga rampai ini, LPM Tradisi berusaha menghadirkan gagasan dan pemikiran generasi muda Nahdliyyin. Kami berusaha melihat kembali sepak terjang NU selama satu abad ke belakang, mengkritisinya, dan mengajukan gagasan baru bagi satu abad NU berikutnya.

Artikel berjudul "Islam Musuh Terbesar Pancasila (?)" yang ditulis oleh Dany Badrun berusaha melihat relevansi nilai-nilai Islam Ahlusunah Wal Jamaah yang dianut oleh NU dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting untuk ditilik mengingat NU menyatakan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam analisisnya, Dany Badrun menemukan bahwa walaupun terdapat beberapa kesamaan, tetap ada perbedaan antara nilai-nilai Islam Ahlusunah Wal Jamaah yang dianut oleh NU dengan nilai-nilai Pancasila.

Tidak hanya pada tataran filosofis, Bunga Rampai Tradisi edisi ini juga melihat realita di lapangan. Artikel berjudul "Identitas Pluralisme Nahdlatul Ulama dalam Dinamika Sosio-Politik di Indonesia" yang ditulis oleh Fandy Arrifqi menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai pluralisme NU di masyarakat. Artikel ini menemukan bahwa nilai-nilai pluralisme NU belum dapat menyentuh lapisan Nahdliyyin akar rumput. Selain itu, nilai pluralisme ini justru dijadikan alat politik untuk menyingkirkan lawan politik NU.

Hal tersebut makin terlihat pada gelaran R20. Artikel berjudul "Menengok Kembali 'Kesuksesan' R20: Bagaimana NU Mengayomi Suara Agama Minoritas?" yang ditulis oleh M. Khoirul Imamil membahas mengenai gelaran R20. Melalui analisisnya, ia menemukan bahwa gelaran R20 hanya sebatas seremonial tanpa ada dampak yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka intoleransi di Indonesia dan minimnya kontribusi NU untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Temuan-temuan di atas merupakan realita yang dilihat oleh generasi muda Nahdliyyin saat ini. Oleh karena itu, besar harapan bahwa Bunga Rampai Tradisi edisi ini dapat memantik dialektika di kalangan muda Nahdliyyin. Tujuannya, tentu, agar NU di abad keduanya dapat menjadi lebih baik.

Fandy Arrifqi
Pemimpin Redaksi

PANCASUH MNCASILA?

ISLAM MUSUH TERBESAR PANCASILA (?)

Oleh Dany Badrun

I. Latar Belakang

Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang pesat dalam beberapa abad ini. Semenjak masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 masehi. pemeluk agama Islam terus meningkat 2,2% setiap tahunnya. Terlepas melalui keturunan/pernikahan/mualaf, saat ini muslim telah mencapai 22% dari seluruh penduduk dunia saat ini yang sekitar 7,7 miliar jiwa yang berarti sekitar 1.7 Miliar manusia beragama Islam. Yang lebih menarik adalah Indonesia menempati puncak jumlah muslim terbesar dengan 200 juta muslim atau 12,7% dari seluruh muslim dunia. (WorldAtlas,2022)

Tak berhenti di sana, fakta lebih menariknya dari sekian banyak negara mayoritas muslim, justru Indonesia yang menjadi negara jumlah muslim terbanyak. Akan tetapi jika kita lihat secara bentuk negara, Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai Republik Indonesia. Secara konstitusi, Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gabriel, 2020). Di lain sisi, secara ideologi pun Indonesia memiliki ideologi negaranya sendiri yang disebut Pancasila (Suryatni, 2018). Untuk penjelasan kali ini saya akan memberikan batasan tafsiran Pancasila hanya berdasarkan versi Prof. Notonagoro.

Agama Islam sendiri memiliki cakupan yang cukup luas. Islam dapat diartikan sebagai hukum, budaya, peradaban, ideologi, bentuk negara, dll. Maka dari itu, saya akan memberikan batasan atas pemaknaan Islam yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu Islam sebagai konsep muamalah. Mengutip dari KBBI, muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Di sisi lain muslim sebagai pemeluk agama Islam tetaplah manusia biasa apapun agamanya. Manusia sebagai homo socius tentunya akan selalu hidup dengan manusia lainnya. Oleh karena banyaknya versi konsep muamalah, saya akan membatasinya hanya pada konsep muamalah dari kaum Nahdliyah.

Maka dari itu pembahasan menarik kali ini untuk melihat apakah Islam sebagai konsep muamalah yang sedemikian banyak tidak menjadi masalah di negara Indonesia yang notabeneanya bukan negara islam?

II. Pembahasan

A. Sejarah Pancasila

Perjalanan panjang penyusunan Pancasila terjadi sejak BPUPKI dibentuk Jepang, yang waktu itu masih menjajah Indonesia, pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari alasan Jepang membentuk BPUPKI, pada akhirnya BPUPKI berkontribusi dalam perundingan para tokoh bangsa untuk meletakkan batu pondasi dari Pancasila itu sendiri. Dalam upaya merumuskan dasar negara resmi di sidang BPUPKI terdapat beberapa usulan. Sidang BPUPKI tersebut berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945.

Mohammad Yamin pada pidatonya 29 Mei 1945 menyampaikan rumusan perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan beliau berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan tata negara di Indonesia. Pada 31 Mei 1945 Soepomo mengemukakan lima dasar juga mengenai persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang dinamakan "Pancasila". Gagasannya yaitu Kebangsaan / Nasionalisme, Kemanusiaan / Internasionalisme, Demokrasi / Mufakat, Kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan (Sjahdeini, 2021). Untuk menanggapi usulan tiga tokoh tersebut dipilihlah sembilan orang untuk dijadikan Panitia Sembilan yang ditunjuk untuk merumuskan dasar negara dan menghasilkan rumusan pertama dasar negara Jakarta Charter pada 22 Juni 1945.

B. Nilai-nilai Pancasila Notonagoro

Notonagoro menjadi tokoh penting dan bisa dikatakan sebagai sosok yang paling baik dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila saat ini. Bagi Notonagoro, Pancasila secara filosofis harus dipandang dari sudut hakikat. Sifat yang hakikat tidak berubah dari perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Maka rumusan paling memungkinkan bagi Pancasila harus bersifat hakikat abstrak karena sedikit isinya tetapi luas cakupannya. Berikut isi Pancasila oleh Notonagoro (1975),

Sila-sila	Nilai-nilai		
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	Tidak ada wadah bagi atheisme	Tidak ada paksaan agama	Ilmu pengetahuan harus mengakui Tuhan sebagai sumber dan dilarang materialistis.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	Menyelaraskan kebutuhan jasmaniah dan rohani	Kepribadian manusia bertingkat yaitu : 1) kemanusiaan(abstrak). 2) pribadi bangsa. 3)konkret kebangsaan. 4) hakikat pribadi dan konkret perseorangan.	Hakikat manusia menyatukan unsur raga dan jiwa (akal, rasa, kehendak), makhluk sosial dan individu, serta makhluk Tuhan dan pribadi sendiri.
3. Persatuan Indonesia	Bangsa Indonesia tak dapat dibagi dan kesatuan	Bangsa Indonesia mempunyai tempat tersendiri di bumi ini	Bhineka Tunggal Ika menjadi lambing kesatuan dan kenegaraan yang tepat bagi Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	Kesesuaian dengan hakikat rakyat yang merupakan keseluruhan jumlah semua warga negara dalam kesatuan dan perseorangan yang terjelma asas demokrasi	Negara Indonesia berdasar pada kekuasaan ada pada rakyat. Bukan perseorangan dan bukan suatu golongan	Mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasar perwakilan untuk mencapai mufakat.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Hubungan negara dan warganya disebut keadilan distributif	Hubungan warga negara dengan negara disebut keadilan legal	Hubungan antar warga disebut keadilan komutatif.

C. Ideologi Negara

Pentingnya sebuah negara memiliki ideologi setidaknya yaitu untuk mengendalikan masyarakat agar terhindar dari kekacauan dan menetapkan tujuan bersama. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ideologi juga dapat dilihat sebagai sarana kelompok sosial yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Terdapat dua macam ideologi menurut sifatnya, yaitu tertutup dan terbuka. Ideologi tertutup adalah ajaran yang menentukan tujuan dan norma sosial politik sebagai kebenaran mutlak. Di sisi lain, ideologi terbuka adalah paham yang hanya berisi orientasi dasar dan untuk penerjemahan tujuan dan norma sosial-politik selalu dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi di Indonesia dapat digolongkan sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan bangsa yang ada pada Pembukaan UUD 1945 yaitu 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) Meningkatkan kesejahteraan umum. 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai ideologi juga dibenarkan oleh dasar konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggaraan negara haruslah rule of law, not of man. Tanpa kesepakatan ini, konstitusi tidak akan berguna. Akan tetapi, konstitusi juga tidak boleh disakralkan sebagaimana masa orde baru, sehingga konstitusi pun juga memberi ruang atas dirinya untuk diamandemen atau diubah.

Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terbukanya ruang untuk membentuk kesepakatan masyarakat mengenai bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika sistem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak individu maupun hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme (Asshiddiqie,2008).

D. Konsep Muamalah Nahdliyah

Dalam hukum fiqih, konsep muamalah masih didominasi mengenai hubungan perdagangan. Konsep muamalah dalam suatu tarekat hadir dalam upaya pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat batin. Akan tetapi, dalam suatu tarekat memberikan jalan yang menentramkan untuk dijalani menuju puncak sufistik.

Tasawuf adalah ideologi dari institusi yang menaunginya, yaitu tarekat. Tarekat sendiri adalah implementasi dari ajaran tasawuf yang berkembang menjadi sebuah organisasi sufi (Mulyati, 2006). Dinamakan thariqah maksudnya menjalankan ajaran Islam dengan lebih hati-hati dan teliti sebagaimana menjauhi

perkara syubhat dan melaksanakan keutamaan sesudah kewajiban pokok. Utamanya dalam mengerjakan salat taha- jud dan sunah rawatib dan sebagainya disertai kesungguhan dalam mengerjakan ibadah dan riyadlah, misalnya berpuasa pada hari Senin dan Kamis, rajin membaca Al-Quran, membaca sholawat nabi, dzikir, tasbih, istighfar, dan sebagainya.

Nahdliyah sebagai salah satu tarekat Islam yang menggunakan tasawuf sebagai instrumennya dalam mendekati diri pada Tuhan, berusaha juga menghadirkan konsep muamalah yang dianggap ideal. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang menaungi tarekat Nahdliyah berusaha menyusunnya sebaik mungkin. Berdasarkan pada Forum Mukhtar Ke-33 NU di Jombang merumuskan bahwa:

1. Menjadikan Quran dan Hadist sebagai pokok syariat Islam serta menerapkan Ijma dan Qiyas.
2. Memahami Quran dan hadist harus melalui sanad yang jelas
3. Memahami Quran dan hadist darulah menyeluruh
4. Hukum dari Quran dan Hadist tidak terdapat kontradiksi
5. Melaksanakan syariat secara kaffaah (komprehensif)
6. Menghormati perbedaan pendapat dalam ijtihad
7. Bersatu dan tolong menolong dengan cara masing-masing
8. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan bijak tanpa kekerasan
9. Mengakui keadilan dan keutamaan para sahabat serta menghormatinya
10. Tidak menganggap siapapun sebagai nabi pasca Nabi Muhammad SAW
11. Tidak menuduh kafir pada sesama

mukmin dan menghindari permusuhan.

12. Menjaga ukhuwah mukmin, saling menolong, menyayangi, dan menghormati

13. Menghormati, menghargai, dan tolong menolong pemeluk agama lain.

Bertasawuf merupakan kebutuhan batin individu dalam meraih kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Agar lestari dan terwujud keompakan, bertasawuf dilembagakan dalam bentuk tarekat. Tarekat eksis karena keberadaan mursyid dan salik yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Konsep muamalah Nahdliyah mendahulukan kelembutan dalam berdakwah mengikuti Rasulullah SAW (Luthfi, 2020).

E. Relevansi

Untuk melihat relevansi dari konsep muamalah dan ideologi dapat dikaitkan dengan melihat penjelasan di atas. Relevansi Pancasila sebagai ideologi negara dengan konsep muamalah Nahdliyah antara lain:

1. Memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Sesuai tujuan bangsa dalam Pembukaan UUD 1945, konsep muamalah Nahdliyah juga mengharapkan perdamaian mengikuti cara diplomasi Rasulullah SAW.

2. Memiliki bentuk yang sama-sama terbuka

Interpretasi makna Pancasila dan konsep muamalah Nahdliyah sama-sama memberikan ruang kebebasan dalam pelaksanaannya.

3. Memiliki nilai tolong-menolong sesama manusia

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menurut Notonagoro dan Mukhtar NU Ke-33 Jombang, keduanya mendorong

pengikutnya untuk saling tolong-menolong dalam kemanusiaan.

4. Menjunjung tinggi nilai keadilan

Nilai Keadilan dalam Pancasila tercantum dalam sila ke-5. Maka selaras pula dalam Mukhtar NU Ke-33 Jombang, keadilan dirumuskan juga di dalamnya.

5. Memiliki nilai ketuhanan dan keagamaan

Sila pertama Pancasila mengenai konsep ketuhanan yang juga dijelaskan oleh Notonagoro mendapatkan relevansi dan keselarasan dengan konsep muamalah Nahdliyah yang berasas pada ketuhanan sebagai sumbernya.

F. Kontradiksi

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan ideologi Pancasila dan konsep muamalah Nahdliyah. Bagian ini menjadi bagian yang sangat perlu untuk didiskusikan dan dikaji lebih lanjut karena memang sifatnya yang selalu terbuka.

1. Ideologi Pancasila sering digunakan sebagai propaganda orang-orang yang berkuasa.

Konsekuensi dari penggunaan Pancasila sebagai ideologi adalah terjadinya penyempitan makna filosofis oleh penguasa demi kelancaran kepentingannya sendiri. Konsekuensi lanjutannya adalah Pancasila dapat juga digunakan sebagai pembenaran atas kepentingan dari pihak yang ada di pemerintahan.

2. Konsep muamalah Nahdliyah sering gagal dipahami dan sulit direalisasikan.

Konsep muamalah Nahdliyah masih bersifat universal. Hal ini terjadi karena memang untuk dijadikannya sebagai paham yang terbuka harus bersifat universal. Sifat universal ini yang menja

di problematik karena bisa saja diartikan secara negatif dan semena-mena oleh oknum tertentu guna pembenaran tindakannya dengan mengatasnamakan Nahdliyah.

3. Ideologi Pancasila dapat diubah oleh berbagai kalangan yang berkuasa, sedangkan konsep muamalah Nahdliyah hanya dirumuskan oleh orang-orang tertentu.

Kontradiksi akan tampak jelas pada proses perumusan keduanya. Karena Pancasila dirumuskan tidak hanya oleh ulama sebagaimana perumusan konsep muamalah Nahdliyah, Pancasila tidak lepas dari latar belakang perumusannya, baik yang islamis maupun tidak. Maka dari itu, pastinya dalam makna atas rumusan keduanya tidaklah mungkin sama.

Sumber kebenaran ideologi Pancasila dan konsep muamalah Nahdliyah tidaklah sama.

4. Sumber kebenaran ideologi Pancasila adalah Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, Quran menjadi sumber kebenaran dari konsep muamalah Nahdliyah. Hal ini akan berbeda karena tidak semua penduduk Indonesia memercayai Quran sebagai sumber kebenaran, sehingga akan ada beberapa penolakan sebagaimana terjadi dalam sejarah Jakarta Charter.

5. Sumber nilai baik dan buruk keduanya masih abstrak dan sukar divalidasi.

Baik dan buruk sangatlah penting untuk dicari kejelasan sumbernya karena dalam suatu gagasan tidaklah tepat bila dasar dan landasan gagasannya masih tidak jelas. Konsekuensi dari sumber yang masih abstrak adalah sukarnya untuk memvalidasi gagasan tersebut. Begitu pula yang terjadi dalam ideologi Pancasila dan konsep muamalah Nahdliyah yang

sangat bergantung pada individu masing-masing.

III. Penutup

Islam menjadi agama yang berkembang paling pesat dalam sejarah manusia. Data juga menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia yang tentunya memiliki banyak potensi dalam sumbangsinya di aspek sosial budaya. Berbagai dampak, baik positif maupun negatif, bermunculan dalam kehidupan muslim Indonesia. Semua potensi tersebut juga dapat menjadi hal yang perlu diteliti dengan serius guna mencegah hal yang tak diinginkan terjadi dan guna mendapatkan hal yang didambakan kedepannya.

Daftar Pustaka

<https://www.worldatlas.com/articles/how-many-muslims-in-the-world.html>
diakses pada 2 November 2022

Gabriel Ega, “Pengertian dan Bentuk-bentuk Negara” diunggah oleh Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI, Padang, 2020

Sjahdeini, Prof. Dr. Sutan Remy, S.H. (2021). Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum. Prenada Media. ISBN 978-623-218-947-8.

Sihotang, Kasdin; Mikhael, Mali Benyamin; Molan, Benyamin; Kama, Vinsensius Felisianus (2019). Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai - Nilai Kebangsaan. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. ISBN 978-623-7247-07-4.

Soeprapto Sri. Aktualisasi Nilai-nilai Filsafat Pancasila Notonagoro. Jurnal Filsafat Agustus '45. Diterbitkan 2017

Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, S.H. Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008.

Mulyati, S. (2006) Mengenal dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Luthfi (2020) Aswaja An-Nahdliyah. diunggah di <https://nusbandang.or.id/memahami-aswaja-an-nahdliyah>



NU & DINAMIKA SOCIAL POLITIK DI INDONESIA

IDENTITAS PLURALISME NAHDLATUL ULAMA DALAM DINAMIKA SOSIO-POLITIK DI INDONESIA

Oleh Fandy Arrifqi

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, Indonesia memerlukan suatu framework untuk menyatukan rakyatnya yang beragam itu. Ideologi Pancasila pun akhirnya dirumuskan untuk menjadi framework pemersatu bangsa Indonesia. Dalam konteks keberagaman agama yang ada di Indonesia, Pancasila menawarkan landasan pluralisme beragama. Pancasila berusaha untuk mengakomodasi semua agama yang ada di Indonesia.

Walaupun berusaha mengakomodasi semua agama yang ada di Indonesia, Pancasila mendapat pertentangan yang kuat dari kelompok Islam di awal-awal masa kemerdekaan. Pertentangan ini berasal dari keinginan kelompok Islam untuk menerapkan aturan syariah di Indonesia. Contoh kelompok Islam yang berusaha menerapkan aturan syariah adalah Masyumi dan DI/TII (Formichi, 2021). Walaupun begitu, tetap ada kelompok Islam yang mendukung

nilai-nilai pluralisme yang dikandung dalam Pancasila. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Tulisan ini akan membahas bagaimana NU menggunakan identitas pluralismenya dalam dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Kegagalan kelompok Islam dalam memperjuangkan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di konstitusi negara dikompensasi dengan menjadikan frasa “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai poin pertama Pancasila. Menurut Formichi (2021), poin ini merupakan penyebab dari gagalnya Pancasila sebagai framework pluralisme beragama. Hal ini disebabkan karena interpretasi poin ketuhanan ini sangat lekat dengan agama monoteistik. Selain itu, hegemoni Islam juga mempengaruhi bagaimana suatu kepercayaan dapat disebut sebagai agama, yakni memiliki kitab suci, seorang rasul, dan satu tuhan. Hal ini secara tidak langsung mendiskriminasi agama-agama non-abrahamik yang ada di Indonesia seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal.

Sepanjang dekade 50-an, Kelompok Islam sangat memperjuangkan agar prinsip-prinsip syariah bisa dimasukkan dalam konstitusi dan ideologi negara. Bahkan, Masyumi mengklaim bahwa muslim yang tidak mendukung berdirinya negara Islam Indonesia adalah orang-orang munafik. Karena perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis tidak kunjung menemukan titik temu, Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya periode demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada periode demokrasi terpimpin ini, NU berkoalisi

dengan pemerintah dengan imbalan jabatan di kabinet dan di lembaga legislatif. Selain itu, NU juga mendukung pembubaran Masyumi oleh pemerintah (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Dukungan NU atas pembubaran Masyumi tidak terlepas dari latar belakang historis pendirian NU. Pendirian NU di tahun 1926 merupakan respon dari bangkitnya gerakan Islam modernis. Membendung pengaruh Islam modernis menjadi penting bagi NU agar bisa melindungi hegemoninya di dalam umat Islam Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi. Pertentangan dengan kelompok Islam modernis ini yang melandasi dukungan NU atas pembubaran Masyumi, yang didominasi oleh kelompok Islam modernis, dan melandasi sikap politik NU setelah reformasi (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Pembentukan identitas NU yang pluralis dan toleran dimulai ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai ketua PBNU di tahun 1984 sampai 1999. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai pluralisme yang dianut oleh Abdurrahman Wahid. Selain itu, pada periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid, NU meninggalkan doktrin mengenai negara Islam dan mengakui Pancasila sebagai asas tunggal seperti yang diperintahkan oleh rezim orde baru. Oleh karena itu, selanjutnya NU menganut asas pluralisme dan toleransi sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Pasca runtuhnya rezim orde baru, terdapat kebangkitan gerakan Islam konservatif. Selain itu, juga muncul gerakan radikalisme pasca runtuhnya rezim

orde baru. Bahkan, muncul kembali wacana untuk memasukkan aturan syariah dan piagam Jakarta ke konstitusi melalui amandemen UUD (Karim, 2021). Pada masa ini, NU kembali menggunakan strategi yang sama seperti saat era orde lama dalam membendung pengaruh kelompok Islam lain, yakni dengan menggunakan narasi pluralisme. Hal ini tertuang dalam konsep Islam Nusantara yang diluncurkan oleh NU di tahun 2015 (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Mengutip dari Mietzner dan Muhtadi (2020), konsep Islam Nusantara merupakan serangan langsung terhadap kelompok Islam modernis. Dalam konteks era reformasi, konsep Islam Nusantara dihadapkan langsung kepada kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini merupakan upaya dari NU untuk melindungi hegemoninya. Selain ancaman dari kelompok modernis, NU juga mendapat ancaman dari kelompok Islam tarbiyah yang tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sepanjang tahun 2004 sampai 2014, dilaporkan banyak masjid yang dikuasai oleh pengaruh NU telah diambil alih oleh pengaruh PKS. Oleh karena itu, penting bagi NU untuk menemukan strategi untuk melindungi hegemoninya.

NU, yang berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo, menggabungkan narasi pluralisme Islam Nusantara dengan framework pluralisme Pancasila. Dari upaya ini, NU dan pemerintah berhasil melarang serta membubarkan FPI dan HTI dengan alasan melindungi pluralisme dan toleransi di masyarakat Indonesia. Hal ini bukan saja merupakan keberhasilan NU dalam melin-

dungi hegemoninya, tapi juga keberhasilan pemerintah dalam membungkam kelompok oposisi (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Walaupun lekat dengan narasi pluralisme dan toleransi, pada kenyataannya, masyarakat pengikut NU bersifat intoleran. Penelitian yang dilakukan oleh Mietzner dan Muhtadi (2020) menemukan bahwa sebagian besar pengikut NU intoleran. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Menchik (2016) yang menunjukkan bahwa pengurus NU bersifat toleran. Artinya, ada ketidaksinambungan antara pengurus NU dengan pengikut NU.

Ketidaksinambungan antara sikap organisasi NU dengan pengikutnya disebabkan karena perubahan nilai di tingkat organisasi bersifat top down dan bukan berasal dari rangkaian evolusi yang panjang. Nilai-nilai pluralisme dan toleransi yang dibawakan oleh Abdurrahman Wahid berangkat dari nilai-nilai yang dianutnya sendiri, bukan berangkat dari dialog diskursus di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, masih banyak kiai dan pesantren NU yang mengajarkan ajaran Islam yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi NU (Mietzner & Muhtadi, 2020).

Pada akhirnya, baik narasi pluralisme NU dan framework pluralisme Pancasila, sama-sama gagal membentuk masyarakat yang pluralis dan toleran. Formichi (2021) menunjukkan bahwa Pancasila gagal menjadi framework pluralisme karena adanya hegemoni agama Islam. Bahkan, ketika kelompok Islam, yakni NU, berusaha merangkul Pancasila dalam rangka menyebarkan narasi pluralisme dan toleransi, nilai-nilai

pluralisme dan toleransi masih gagal tertanam di masyarakat Indonesia. Malah, narasi pluralisme yang ada justru seakan-akan digunakan untuk kepentingan sektoral semata. Pembubaran serta pelarangan FPI dan HTI menunjukkan agenda pemerintah dan NU untuk melindungi kuasa dan hegemoninya. Artinya, pembentukan identitas pluralisme NU berangkat dari kepentingan sektoral untuk mengamankan hegemoni NU di Indonesia dari gerakan Islam modernis.

Daftar Pustaka

Formichi, C. (2021). The Limits of Pancasila as a Framework for Pluralism. Dalam C. Formichi, *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy* (hal. 1-13). New York: Cornell University Press.

Karim, A. G. (2021). Dari Pertarungan Ideologi ke Konservatisme: Kajian Politik Islam di Indonesia. Dalam W. Mas'udi, & A. G. Karim, *Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik dan Pemerintahan* (hal. 57-72). Sleman: Gadjah Mada University Press.

Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism*. Cambridge University Press.

Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 42 No. 1, 58-84.

NU & AGAMA MINORITAS

MENENGGOK KEMBALI ‘KESUKSESAN’ R20: BAGAIMANA NU MENGAYOMI SUARA AGAMA MINORITAS?

Oleh M. Khoirul Imamil M

Perhelatan G20 di Bali pada November 2022 yang diklaim sukses oleh berbagai pihak menghasilkan beragam rumusan strategis bagi negara-negara dunia. Seusai hajatan akbar ini, para pemimpin dunia diharapkan dapat bersama-sama menyemai benih-benih kehidupan geopolitik dan ekonomi internasional yang lebih baik di tengah gencarnya isu perang Rusia-Ukraina serta ancaman resesi global. Tak sekadar bahasan politik dan ekonomi semata, G20 menghidangkan sajian sub-event lain yang tak kalah sumringah bertajuk R20 (Religion Forum for The Group of Twenty). Forum R20 yang digawangi

Ketua Umum baru PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bersama Ketua Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al Issa ini mengangkat tema besar Membangkitkan dan Menyuburkan Agama sebagai Sumber Solusi (Chwarazmi & Sekar, 2022). Tema akbar ini kemudian ditranslasikan dalam empat turunan fokus, yakni mencegah permusuhan berbasis identitas; menangkal penyebaran kebencian komunal; menyuarakan persaudaraan dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat, budaya, dan negara; serta mendorong terwujudnya tatanan dunia yang berkeadilan dengan didasarkan pada penghormatan dan kese-

derajatan hak serta martabat manusia..

Nahdlatul Ulama (NU) banyak disorot lantaran dianggap berjasa besar dalam menyukseskan acara R20 ini. Selain Gus Yahya yang tampil sebagai inisiator, setidaknya ada beberapa tokoh kenamaan NU lain yang turut manggung seperti KH. Miftahul Akhyar (Rais Aam PBNU), Ulil Abshar Abdalla (Ketua Lakpesdam PBNU-Pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL)) serta Yenny Wahid (putri Gus Dur—mantan Ketum PBNU). Mereka turut menjadi perwakilan delegasi Indonesia dalam menyambut dan berdiskusi bersama lebih dari 100 delegasi pimpinan agama dan sekte di dunia. Tak cukup sampai di situ, nuansa ke-NU-an terasa semakin kuat dengan adanya kunjungan para delegasi ke Pesantren Pandanaran, Yogyakarta yang cetha wela-wela haluan nahdliyyah-nya. Bagaimanapun, tak dapat dimungkiri bahwa pesantren adalah basis grassroot NU, kawah candradimuka bagi para pembesarnya dahulu saat menjalani proses pendidikan hingga mampu tampil ke panggung dunia. Tak ayal, perhelatan R20 telah membuat warga nahdliyyin bangga dengan sepak terjang para pemukanya. NU dinilai berhasil menyajikan nuansa keberagaman keagamaan di Indonesia yang dibingkai secara apik sembari terus mempromosikan wacana urgensi moderasi beragama.

Namun, sungguhkah narasi keberagaman keagamaan itu berhasil diejawantahkan dalam forum R20 secara adil? Bagaimana dengan nasib agama-agama dan sekte minoritas yang ada? Catatan Tim Redaksi *islambergerak.com* menunjukkan bahwa R20 sama sekali tak berpihak pada agama minoritas (Berge-

rak, 2022). Setidaknya, ada dua hal utama yang menjadi landasan argumen tersebut, yaitu tidak adanya wakil pemuka agama minoritas seperti Majelis Ulama Rohingya serta (malah) diundangnya wakil agama yang dinilai sebagai penindas yakni Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). RSS adalah organisasi Hindu sayap kanan India yang selama ini beraliansi dengan pemerintahan PM Narendra Modi untuk mendiskriminasi hak-hak warga Muslim India. R20 belum memberikan kesempatan kepada pemuka-pemuka agama minoritas—secara numerik maupun persekusi—untuk tampil menyuarakan jeritan umatnya. Bagi *islambergerak.com*, gelaran R20 seperti tak ubahnya sekadar repetisi atas diskusi-diskusi lama yang berusaha menekan konsensus keagamaan sebagai upaya diplomasi, legitimasi, serta pengukuhan hegemoni. Pandangan ini tentu tak berlebihan, mengingat dalam tujuh komunike (kesepakatan) yang dihasilkan dalam forum R20 tersebut, tak satupun menyebut secara eksplisit terkait penanganan Muslim Rohingya Myanmar, masyarakat Palestina, serta kelompok Muslim Uighur di Tiongkok. Ketiganya adalah contoh nyata persekusi agama atas agama, penindasan kemanusiaan berbekal keyakinan beragama, serta pembenaran akan aksi pembunuhan dan kekerasan di atas semangat iman. Sayang, NU sebagai basis organisasi Muslim kawakan masih tak benar-benar berani bersikap dan memilih sekadar menyaksikan persekusi itu berlarut dari waktu ke waktu bersama lobi-lobi politik yang seringkali bertemu kebuntuan (Hasan & dkk, 2023).

Lebih jauh, R20 terasa cenderung terlalu ambisius dalam menitikkan fokusnya pada masalah-masalah arus utama yang telah menjadi narasi publik sepanjang hari. Aksentuasi R20 pada upaya penyelesaian masalah-masalah politik, ekonomi, militer, serta tetek-bengeknya di satu sisi mungkin dipandang sebagai representasi atas kehadiran agama sebagai sumber solusi. Namun, di sisi lain, apa jadinya bila ternyata sesuatu yang coba ditampilkan sebagai gudangnya solusi itu justru tengah bobrok dengan masalah internalnya sendiri? Nasib buruk yang terus menghantui pemeluk agama-agama minoritas adalah contoh nyata bagaimana agama masih belum bisa berbicara banyak dalam upaya mewujudkan keberagaman yang hakiki (Kuru, 2020). Persekusi yang dilakukan umat beragama terhadap umat lain atas nama agama menunjukkan betapa tugas esensial agama sebagai sumber kemanusiaan belum benar-benar terwujud.

Kealpaan ini tak lain terjadi akibat fokus agama yang kian bergeser. Islam umpamanya, semula ia sebagaimana dipercayai merupakan ajaran berdasar kalamullah yang ditujukan untuk umat manusia yang tengah didera krisis kemanusiaan. Masa itu masyhur dikenal dengan istilah jahiliah (kebodohan). Namun, bukan kebodohan secara intelektual yang saat itu akut menjangkiti masyarakat, melainkan kebodohan budi pekerti yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perbudakan, permusuhan, peperangan, penindasan terhadap kaum marjinal, hingga eksploitasi perempuan merupakan wajah kusam umat manusia pada zaman itu. Alhasil, Islam tiba sebagai pembebas atas praktik-praktik

merupakan wajah kusam umat manusia pada zaman itu. Alhasil, Islam tiba sebagai pembebas atas praktik-praktik non-humanis tersebut. Kini, dalam perjalanannya, Islam makin terasa tak begitu dekat dengan isu kemanusiaan. Islam lebih lantang disuarakan para pemukanya kala Pemilu tiba. Tentu semua masih ingat dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, bagaimana Islam dan kelompok yang mengaku pembela Islam mempropagandakan Islam sebagai justifikasi atas kekafiran salah seorang calon serta keharusan memilih jago yang dinilai lebih 'Islamis' (Widyanto, 2017). Begitu juga dengan agama-agama besar lainnya, pemuka-pemukanya akan lebih merasa hebat ketika dekat dengan pejabat, berada di posisi top eselon dalam struktur pemerintahan, atau mencapai sukses dengan beragam deal proyek pembangunan. Di saat bersamaan, umat tengah menjerit dalam penindasan dan kekerasan yang tak jelas kapan akan usai.

Dalam lingkup NU, sejarah menunjukkan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia (qila di dunia) ini tak sepenuhnya berani berpihak pada agama-agama minoritas. Mungkin Gus Dur masih terus dielu-elukan sebagai reformis NU sekaligus 'bapak humanisme' dengan keberanian dan sepaik terjang beliau dalam melindungi pemeluk agama-agama minoritas, seperti Syiah, Ahmadiyah, hingga Konghucu. Gus Dur memang merupakan sosok teladan dalam mewujudkan nilai-nilai keagamaan sebagai basis kemanusiaan yang sejati. Sayangnya, sepeninggal Gus Dur, para penerusnya tak seberani dan secerah beliau dalam menapaki cahaya-cahaya kemanusiaan yang Gus Dur wariskan.

Tahun 2012 silam misalnya, kala itu sempat heboh soal sekte Syiah pimpinan Tajul Muluk di Sampang, Madura yang dinilai banyak pihak sebagai aliran sesat ((HRW), 2012). Menjelang akhir Desember 2011, kediaman Tajul Muluk menjadi sasaran penyerangan dari militan dan pendukung Islam arus utama (Sunni). Bahkan, konflik kontraententif tersebut sampai menimbulkan tumpahnya darah salah seorang pemeluk Syiah. Mirisnya, bukannya mendapat perlindungan, kelompok Syiah tersebut justru terus diintimidasi melalui propaganda anti-Syiah. Tak sampai di situ saja, Tajul Muluk malahan divonis pidana penjara selama dua tahun dengan tuduhan penodaan agama dengan argumentasi hakim yang berbelit-belit. Kemudian, propaganda anti-Syiah tersebut mendapat akomodasi pemerintah hingga terbitlah fatwa sesat yang dikeluarkan MUI Sampang. Bak gayung bersambut air, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mantap berada di barisan pendukung fatwa tersebut. Alhasil, kelompok Syiah menjadi semakin tersingkir dan teralienasi dari lingkungan masyarakat yang kadung digerogoti perspektif konservatisme. Kejumudan sinergis yang (sengaja) terbangun antara pemerintah dan elit ulama arus utama telah menghasilkan komunitas masyarakat yang terlalu phobia akan pluralisme keagamaan.

Lantas, apa yang semestinya dan idealnya kita lakukan sebagai bagian dari komunitas dunia yang berkeagamaan lagi berperadaban—yang disebut Yuval Noah Harari sebagai manusia dewa? Sekadar berpangku pada para pemuka nan petinggi bukanlah solusi ideal bagi kalangan

idealis hari ini. Laku gerakan dan aksi nyata yang didasari kecemerlangan alternatif-alternatif ide adalah dua kunci utama dalam mengkreasikan suatu perubahan. Setidaknya, dalam konteks bahasan ini, umat agama minoritas mendapat perhatian publik yang lebih untuk tak lagi dipinggirkan, dimarjinalisasi, serta dianeksasi hak-haknya. Alternatif gagasan yang harus ditempuh paling dini adalah pembentukan kesadaran akan diversitas sebagai bagian dari konstelasi keumatan. Kita—dalam konteks Islam—seringkali mendengar para da'i, muballigh, penceramah, ustadz, kyai, tuan guru dan seterusnya menggemakan eksistensi perbedaan sebagai suatu fitrah (keniscayaan). Tentunya, keniscayaan yang bersumber dari kehendak ilahiah tersebut harus diejawantahkan dalam sinergitas sanubari, energi pikiran, serta tindak-tanduk.

Sebagaimana isyarat Al Quran bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keberagaman bangsa maupun suku. Ia—selaku sang Khalik—agaknya menghendaki agar ciptaan-Nya saling mengenal dan memahami satu sama lain (li ta'aarafuu). Makna saling adalah makna paling khas dari bentuk wazan musyarakah yang dipakai dalam kalimat ini. Sayangnya, di titik inilah umat justru seringkali lupa dan alpa. Segolongan yang merasa mayor secara jumlah maupun power menganggap dirinya harus dikenal dan dipahami sebagai pemilik otoritas. Sementara itu, segolongan lain yang minor secara numerik maupun partisipasi, pada akhirnya dipaksa untuk tunduk manut pada kalangan mayor. Jelas, ini tak merefleksikan tuntunan ke-saling-an yang menuntut

kesederajatan, bukan kekastaan hirarkis.

Kemudian, ketika kesadaran akan fitrah diversitas serta hubungan ke-saling-an dalam konteks kesederajatan tersebut telah terbentuk, selanjutnya umat perlu beranjak pada perwujudan aksi nyata dalam kehidupan keseharian. Cara paling sederhana yang bisa dilakukan adalah menghindarkan diri dari kebiasaan mengkotak-kotakkan individu per individu, komunitas per komunitas, maupun individu dengan komunitas. Karena, setiap yang berbeda dari kita sebenarnya juga bagian dari kita, baik secara individu—dalam konteks pandangan berpikir, keyakinan, dst—maupun secara komunitas—dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Daftar Pustaka

Kuru, Ahmet T. Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. 2020. Jakarta: Gramedia

Hasan, Adil Al., dkk. Derita Penghayat Kepercayaan, Transgender, dan Minoritas Agama. 2023. Yogyakarta: AJI Yogyakarta

“Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Agama Minoritas di Indonesia” 28 Februari 2013 https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256410#_ftn32 (diakses pada 23 Januari 2023)

“Tak Ada Keberpihakan Agama pada Umat Tertindas di R20” 6 November 2022 <https://islambergerak.com/2022/11/tak-ada-keberpihakan-agama-pada-umat-tertindas-di-r20/> (diakses pada 20 Januari 2023)

“Ulama Syiah Dipidana Penodaan Agama” 16 Juli 2012 <https://www.hrw.org/id/news/2012/07/16/246970> (diakses pada 23 Januari 2023)

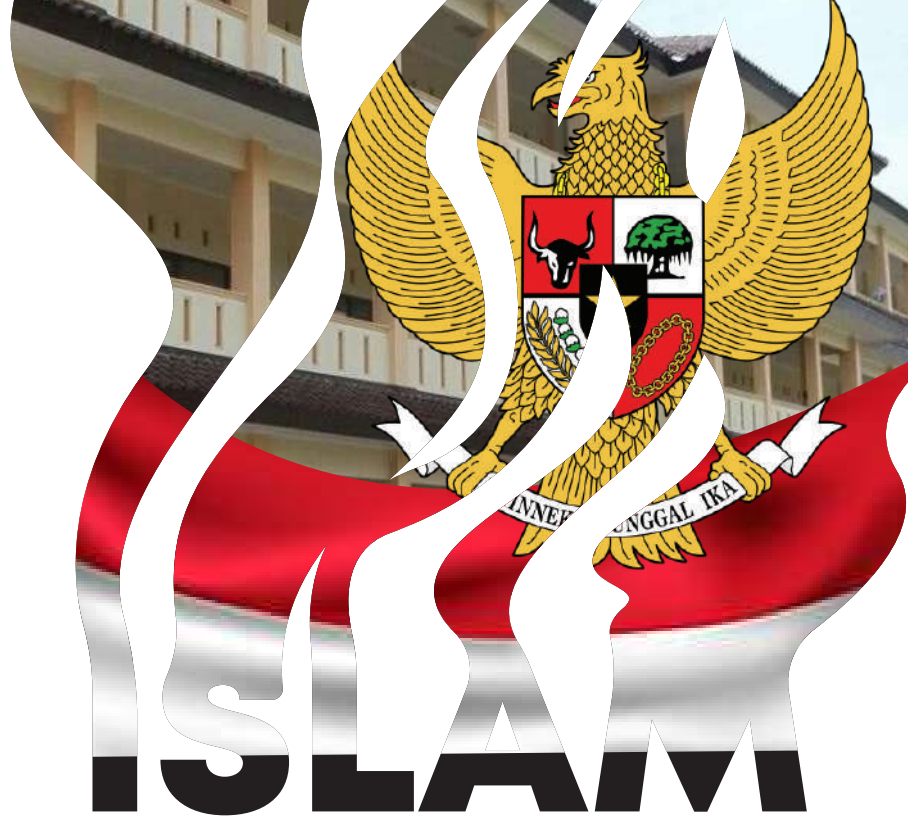
“Survei LSI: Sentimen Agama Menentukan di Pilkada DKI” 24 Januari 2017 <https://pilkada.tempo.co/read/839339/survei-lsi-sentimen-agama-menentukan-di-pilkada-dki> (diakses pada 24 Januari 2023)

“Kesepakatan Forum R20 Bali: Cegah Konflik hingga Larang Kebencian Komunal”

4 November 2022 <https://kumparan.com/kumparannews/kesepakatan-forum-r20-bali-cegah-konflik-hingga-larang-kebencian-komunal-1zBRqHzZU4P> (diakses pada 20 Januari 2023)

“Forum R20, Saat Pemuka Agama dari Penjuru Dunia Bahas Perdamaian di Bali”

3 November 2022 <https://kumparan.com/kumparannews/forum-r20-saat-pemuka-agama-dari-penjuru-dunia-bahas-perdamaian-di-bali-1zB4jZkcoJ8> (diakses pada 20 Januari 2023)



ISLAM-PESANTREN, VISI KEBANGSAAN, DAN JALAN KESELAMATAN

Oleh Najma Alya Jasmine

Prinsip dasar Islam adalah mengemban amanah maqashidus-syari'ah (tujuan syariah), yaitu dasar pijakan kehidupan manusia yang harus dipenuhi (dharury) supaya kemaslahatan dapat berjalan dengan baik. Maqashidus-syari'ah, diformulasikan dalam terma ad-dharuriyyat al-khams atau al-kuliyat al-khams oleh hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazaly dalam kitab al-mushtasfa min ilmi al-ushul (pendapat berbeda dari Yusuf Hamid, yang menyebut dari kitab syifa' al-ghalil). Konsep ini kemudian dikembangkan Abu Isyhaq Asy-Syatiby, dalam al-muwafaqat fi ushulasy-syari'ah (Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an Balitbang

dan Diklat Kemenag RI, 2013). Ad-dharuriyyat al-khams atau al-kuliyat al-khamsah tersebut berjumlah lima. Pertama, menjaga dan memelihara agama dan kepercayaan (hifzh al-dîn). Kedua, menjaga dan memelihara jiwa (hifzh al-nafs). Ketiga, menjaga dan memelihara akal pikiran (hifzh al-'aql). Keempat, menjaga dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl/'irdh). Kelima, menjaga dan memelihara harta (hifzh al-mal).

Pada perkembangan kontemporer, akibat kerusakan lingkungan yang luar biasa besar, mulai muncul ide dan gagasan untuk memasukkan, menjaga, dan memelihara lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah). Hal ini masuk ke dalam kate-

gori dharury, sehingga konsep dharury menjadi ad-dharuriyyat as-sitt atau al-kuliyyat as-sitt (Ali Yafie, 2006). Kelima atau keenam dharury di atas sesungguhnya berfungsi memastikan terwujudnya kehidupan yang adil (al-'adalah), setara (al-musawah), manusiawi (al-basyariyah), yang menjunjung tinggi lokalitas (al-'adah), kebhinekaan (at-ta'addudiyyah), dan keharmonisan (mu'asarah bil ma'ruf).

Penggerak Cinta Tanah Air

Dalam konteks untuk menjaga kemaslahatan itulah pesantren hadir dan menjadi garda terdepan melawan setiap bentuk penjajahan sejak zaman kolonial. KH. Hasyim Asy'ari adalah representasi paling menonjol dari dunia pesantren yang sangat dihormati oleh berbagai elemen bangsa lainnya. Beliau adalah pemimpin spiritual sejumlah laskar, tokoh politik, dan militer, seperti Jendral Sudirman, Bung Tomo, laskar Hizbullah, dan Sabilillah (Lathiful Khuluq, 2000). KH. Hasyim Asy'ari juga memimpin MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sekaligus bergandengan tangan dengan kelompok nasionalis dalam GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Selain sebagai ketua Masyumi, pada masa Jepang, KH. Hasyim Asy'ari menduduki beberapa jabatan penting dan strategis, seperti Kementerian Agama, penasehat Jawa Hokokai, dan penasehat prajurit PETA.

Jejak KH. Hasyim Asy'ari di²³ bidang pendidikan, ekonomi, politik, semua berbasis pada lambaran keagamaan moderat untuk kemaslahatan dan kemanusiaan universal. Hasilnya, Tebuireng menjadi pesantren terpenting

dan terbesar dan menjadi pusat rujukan di Jawa abad 20. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia bahkan dunia, sekaligus memiliki cabang terbanyak di luar negeri. Fatwa-fatwanya menjadi rujukan utama bagi umat Islam dan pejuang kemerdekaan. Jauh sebelum NU lahir, KH. Hasyim Asy'ari berhasil menggerakkan ekonomi umat melalui Nahdlatut Tujjar (1918) dan Tashwirul Afkar (1922) sebagai kiblat para ilmuwan dan budayawan. Tentu saja tidak bisa dinafikan Nahdlatul Wathon (1924) yang menjadi kawah candradimuka para kader masa depan yang tangguh.

KH. Hasyim Asy'ari juga menulis 14 kitab berbahasa Arab, yang kemudian dikumpulkan dalam satu jilid oleh KH. Ishomuddin Hadzik berjudul Irsyadus Sari fi Jami'Il Mushannafat Hasyim Asy'ari. Keberhasilan tersebut tidak lain karena KH. Hasyim Asy'ari tepat sekali dalam memanusiaikan manusia, yang secara metaforik beliau sebut dengan "rambut jangan diputus, tepung jangan berserak" sehingga dapat dirasakan Islam sebagai rahmatanil 'alamin (Aboebakar, 1957). Maka, KH. Hasyim Asy'ari disebut sebagai kiai paling besar dan terkenal di Indonesia abad 20 (Zamakhsyari Dhofier, 1980), wali, sumber berkah, dan penghubung para kyai di seluruh Jawa (James J. Fox, 1991), dan kyai pergerakan, ahli strategi, bapak komunitas santri, bapak spiritual NU, dan inspirator nasionalisme dunia pesantren (Abdurrahman Mas'ud, 1995).

KH. Hasyim Asy'ari ketika mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng (1899), selain misi khitah pendidikan dan sosial keagamaan, juga misi melawan

penjajah Belanda. KH. Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan tanpa menjauhkan pesantren dari pusat dan simbol kekuasaan kolonial, sebab langsung berhadapan secara simbolik maupun fisik. Pabrik gula Cukir adalah simbol modernisasi, sumber ekspor terpenting, kemapanan kekuasaan dan ekonomi kolonial yang didirikan oleh penjajah Belanda. Pesantren Tebuireng hanya berjarak selemparan batu dari pabrik gula yang hingga kini masih gagah berdiri. Melalui cara ini, KH. Hasyim Asy'ari telah mengibarkan genderang perang. Aksi-aksi protes dan perlawanan, baik secara strategis maupun taktis dilakukan KH. Hasyim Asy'ari. Karena sikap inilah, Pondok Pesantren Tebuireng selalu dihambat Belanda (Latiful Khuluq, 2000). Gambaran kekejaman penjajah pada pesantren, khususnya di Tebuireng nyata sekali sebagaimana dalam film Sang Kiai.

Kemerdekaan untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Umat

Pada zaman Jepang, melalui KH. A. Wahid Hasyim pada Oktober 1944, KH. Hasyim Asy'ari menganjurkan kepada umat Islam untuk membebaskan negara, bangsa, dan agama dari penjajahan (KH. A. Aziz Masyhuri, 2006). Selain itu, jabatan di Jawatan Urusan Agama yang ditawarkan Jepang ke KH. Hasyim Asy'ari diterima, tetapi karena alasan umur, maka yang menjalankan adalah KH. A. Wahid Hasyim. KH. A. Wahid Hasyim atas restu KH. Hasyim Asy'ari, meminta Jepang agar pemuda Indonesia dilatih bidang militer. Melalui pelatihan ini, ribuan pemuda Indonesia akhirnya menguasai kemiliteran dan

strategi perang. Pada saat bersamaan, reformasi pendidikan di Tebuireng dengan mengajarkan pelajaran umum, Bahasa Melayu dan bahasa asing, telah mulai tampak hasilnya, sehingga banyak lulusan Tebuireng bisa bekerja di pemerintahan daerah. Politik akomodasi dan kooperatif ini dimaksudkan sebagai cara untuk memperjuangkan dan menyiapkan kemerdekaan Indonesia yang lebih cepat. KH. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa karena Jepang telah menipu, maka harus ditipu dengan cara kita untuk Indonesia merdeka, demikian urai KH. Saifudin Zuhri dalam salah satu bukunya Guruku Orang Orang dari Pesantren (1999). Ini merupakan cara membangun relasi kuasa yang lebih strategis dan taktis dalam rangka pencapaian cita-cita nasional yang lebih besar, yaitu Indonesia merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika terjadi perdebatan keras tentang bentuk negara Indonesia antara kelompok pendukung negara Islam dengan negara sekuler memuncak, Moh. Hatta melakukan lobi kepada Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku M. Hasan, dan KH. A. Wahid Hasyim. Untuk menjaga keutuhan bangsa, maka mereka menyetujui penghapusan rujukan agama Islam dalam Mukadimah Undang Undang Dasar (Andree Feillard, 1999). Komunitas pesantren juga terlibat aktif dalam perumusan Pancasila bersama tokoh nasionalis, seperti Soekarno dan Muhammad Yamin, yang diwakili beberapa tokoh kuncinya seperti Kahar Muzakir, KH. A. Wahid Hasyim, dan KH. Masykur. Keberhasilan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ini menunjukkan secara tepat

bahwa para pemimpin Islam masa itu lebih mementingkan pendekatan substansialis ketimbang pendekatan literalis (Andree Feillard, 1999).

Ada dua fatwa kunci KH. Hasyim Asy'ari yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Pertama, fatwa yang menyatakan Indonesia adalah negara damai (Darus Sulh) yang wajib dibela dan dipertahankan. Kedua, fatwa resolusi jihad, yang menyatakan bahwa mengangkat senjata melawan Belanda adalah jihad-perang suci. Fatwa Resolusi Jihad ini menggerakkan semangat rakyat melawan Belanda dan Inggris pada perang 10 November 1945. Kemudian, pemerintah Indonesia menetapkan 10 November sebagai hari pahlawan dan 22 Oktober sebagai Hari Santri.

Fakta historis di atas mengajarkan bahwa ulama pesantren dan NU selalu ada di garda depan untuk mempertahankan ke-Indonesia-an yang beragam. NU adalah organisasi sosial keagamaan pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Ketika radikalisme, terorisme, dan sejenisnya yang berusaha mengganti Pancasila sebagai dasar negara, penerus KH. Hasyim Asyari berada di garis terdepan pembela Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Empat pilar itulah yang diyakini pesantren dan NU akan membawa jalan keselamatan-kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ketetapan inilah maka KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menegaskan; Boleh mengkritik pemerintah tapi tidak boleh melawan negara (Andree Feillard, 1999).

Jaringan sosial-ekonomi-politik kyai, pesantren, dan NU bekerja secara masif di seluruh penjuru kota dan desa

memberikan baktinya kepada masyarakat dan negara. Semua dilakukan demi menjaga dan menegakkan tujuan syariah yaitu kemaslahatan, kedamaian, dan keselamatan bangsa. Mengikuti Bahasa Al-Qur'an, untuk mengharapkan terwujudnya *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* di bumi Indonesia.

Daftar Pustaka

Aziz Masyhuri, A. Kyai Haji. 2006. Permasalahan thariqah : hasil kesepakatan muktamar & musyawarah besar Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama (1957-2005). Surabaya : Khalista

Aboebakar Atjeh, Haji. 1957. Sedjarah hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan karan-gan tersiar. Jakarta : Panitia Buku Peringatan

Dhofier, Zamakhsyari. 1980. Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia). Jakarta: LP3ES

Feillard, Andree. 1999. NU Vis-A-Vis Negara. Yogyakarta : The Asia Founda-tion

Khuluq, Lathiful. 2000. Fajar kebangunan ulama : Biografi K.H. Hasyim Asy'ari. Yogyakarta: LKiS

Yafie, Ali. 2006. Merintis Fiqh Lingkungan Hidup. Jakarta: UFUK Press



PRAG- MATIS

PUISI PRAGMATIS

Oleh : Dany Chandra Purnama Wibowo

Di tengah multi-kulturalis
Semua pihak ingin jadi yang terlaris
Gegap gempita berlomba narsis
Hingga asa terasa amis

Wahai golongan tua idealis
Untuk apa lagi hidup tergaris
Jika memang tak lagi realistis
Matilah sudah cita dan tangis

Kita tak lagi berharap dalam keringat
Kita haruslah sudah mulai bermanfaat
Kita bermanfaat itu harus juga cepat
Kita pun juga bagian dari masyarakat
Masyarakat kuat, hebat, dan bersahabat.

Sleman, 21/10/2022



Kontributor

Dany Chandra Purnama Wibowo, akrab dipanggil Dany/Badrin oleh beberapa rekanan. Dany Badrin lahir di Kota Semarang, 15 November 2003 dan menjadi anak kedua dari dua bersaudara. Dany Badrin saat tulisan ini ditulis sedang berstatus sebagai mahasiswa S1 Filsafat di Universitas Gadjah Mada dan tergabung dalam organisasi kemahasiswaan pada PMII UGM, LPM Tradisi, dan LSF Cogito. Pada kesempatan yang akan datang Dany Badrin juga aktif dalam kegiatan kefilosofatan seperti International Conference of Nusantara Philosophy dan juga Great Philosopher yang diadakan oleh Fakultas Filsafat UGM. Untuk email yang dapat dihubungi silakan mengirim pesan pada danywibowo151103@gmail.com

Fandy Arrifqi merupakan mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Pernah diamanahkan menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Balairung dan kini dipercaya untuk menjadi Pemimpin Redaksi LPM Tradisi. Fandy dapat dihubungi melalui surel fandyarrifqi00@gmail.com

M. Khoirul Imamil M tak lahir dari rahim seorang Sayyidah Aminah sehingga menjadikannya teladan umat. Ia hanyalah pria biasa yang juga lahir dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Sedari awal, ia tak punya keistimewaan signifikan yang dapat tertranslasikan dalam ragam trofi, sertifikat penghargaan, atau apapun yang umumnya menjadi indikator keistimewaan seseorang dalam peradaban hari ini. Pria setinggi 168 cm ini punya beragam minat serta ketertarikan, bukti bahwa ia seorang yang bukan spesialis lagi pengamin LGBTQ (dalam ranah pemikiran, minat, dan kecenderungan). Di tahun ketiganya meniti pendidikan di SV UGM saat ini, ia masih bertahan dengan keimanannya akan motto hidup membiasakan diri untuk biasa-biasa saja. Meski ia tak yakin akan ada yang berkenan mengenalinya, ia terbuka untuk menyambung kasih melalui surel pada imamilmutaqin2002@gmail.com.

Najma Alya Jasmine. Mahasiswi Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Kini aktif di PMII Rayon Ali Maksum UGM. Najma dapat dihubungi melalui satuhati_jogja@yahoo.com.

Dalam kalender Hijriyah, tahun 2023 M atau 1444 H adalah satu abad Nahdlatul Ulama (NU). Perayaannya di Sidoarjo gegap gempita, disambut, dan semua yang hadir merasa beruntung. Sejak kelahirannya pada tahun 1926 M atau 1344 H, NU telah menjadi bagian dari negeri ini. Hadratussyaikh bersama 'alim ulama yang istimewa menghadirkan Islam yang Nusantara, terus hidup, dan meluas. Namun, sepak terjang NU juga tak luput dari kritik yang munculnya perlu jeli. Meski narasi pluralisme dan toleransi lekat di tubuh NU, kenyataan di lapangan berkata lain. Ada pula kontradiksi ideologi Pancasila dengan konsep muamalah Nahdliyyah. Dalam lingkup NU pun, sejarah menunjukkan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia (qila di dunia) ini tak sepenuhnya berani berpihak pada agama-agama minoritas. Bunga Rampai Tradisi Edisi 01 hadir sebagai tanda mata sekaligus Upaya LPM Tradisi untuk membangun diskursus menuju abad kedua NU, yang, harapannya, lebih menggembirakan.

LPM Tradisi

PMII Komisariat Gajah Mada

Jl. Nuri No. 29,

Pohrubuh, Condongcatur, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55283.